

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PENYUSUNAN APBDES DI DESA MERTANI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

Heru Irianto ¹⁾, Tri Prasetyowati ²⁾, Robichah Miladiyah ³⁾

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya
email : heru@ubhara.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya
email : triprasetyowati@ubhara.ac.id

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya
email : rbicha06@gmail.com

Abstract

The purpose of this research to describe the participation of village communities in the preparation of APBDes in Mertani Village, Karanggeneng District, Lamongan Regency. The type of research used is descriptive method with a qualitative approach and the data analysis used in this study is data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data collection techniques with in-depth interviews, documentation, and library studies. The informants in this study consisted of 6 (six) people who were considered to be able to provide detailed information on community participation in the preparation of the village income and expenditure budget. Through the results of research conducted by researchers using the theory of Cohen and Uphoff, it shows that community participation in the preparation of the village income budget, namely: (1) Participation in decision making, the community is involved in the preparation of the APBDes by expressing their opinions, conveying ideas and ideas, and also the village government considering even programs that are planned to be carried out by the village government are discussed once a year at the village development planning meeting (2) Participation in implementation, the existence of a mutual cooperation attitude of the village community in implementing the APBDes program (3) Participation in taking benefits, the village government using self-management that utilizes Mertani Village community. (4) Participation in the evaluation, the community is still less involved.

Keywords: Participation, Society, APBDes

PENDAHULUAN

Semenjak era Reformasi di Indonesia sampai saat ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaiki diberbagai lini pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dalam hal ini pemerintah membentuk sistem politik yang demokratis. Maka terjadinya perubahan secara mendasar dalam hal keikutsertaan masyarakat untuk proses sosial, ekonomi dan politik. Awal mula kebijakan yang dahulu bertumpu pada *top down* menuju *bottom up*. Sederhananya dapat dikatakan hakikatnya dari perubahan politik tersebut ke arah demokrasi yang dituntut untuk selalu melibatkan masyarakat. Dalam hal pengambilan kebijakan publik sudah ditemui

pola seperti itu, dan sering dirumuskan sebagai partisipasi masyarakat.

Tetapi selama ini, pembangunan daerah masih terus didominasi oleh strategi yang menempatkan pembangunan masyarakat desa pada posisi setelah pembangunan kota (kelurahan). Padahal sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan yang pada umumnya taraf hidup mereka masih rendah.

Dengan demikian amatlah penting untuk meneruskan proses desentralisasi untuk sampai ke tingkat desa. Artinya Pemerintah Kabupaten dan Kota harus mampu memaknai hakekat otonomi daerah sebagai perwujudan menciptakan masyarakat desa yang mandiri

dengan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintahan desa.

Menurut Sitorus dan Prasetyanto bahwa desa adalah tumpuan atau garda terdepan harapan keberhasilan dari segala urusan dan segenap unsur yang berada di atasnya, maka pembangunan desa harus diupayakan sebagai suatu proses yang bergerak maju atas kekuatan masyarakat desa itu sendiri (*self sustaining process*). Jadi dapat dimengerti bahwa keberhasilan pembangunan nasional tercermin oleh keberhasilan pembangunan masyarakat desa, sebagaimana dikemukakan oleh Marbun (Mohammad Mulyadi, 2019:3)

Menurut M. Anwas Pembangunan Indonesia yang telah dicanangkan sejak masa kemerdekaan hingga sekarang terus dilaksanakan demi perbaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pembangunan secara umum bermakna segala proses yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan. Pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas hidup. (Ajeng Dini Utami, 2019:17)

Mohammad Mulyadi (2019) menjelaskan partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka.

Peran serta masyarakat sendiri dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Proses demokrasi dalam pemerintahan berbasis pada keterlibatan masyarakat dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan. Seperti pada Undang-undang dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, yang berarti partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah sebuah

keharusan dimana masyarakat adalah pemilik kedaulatan.

Dalam hal ini, untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan ialah dimana adanya keterlibatan masyarakat Desa Mertani dalam sebuah pembangunan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah kunci utama bagi pemerintah desa untuk melakukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat desa, maka dari itu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) didasarkan dengan Permendagri No. 37 tahun 2007, yang tahap pengelolaan penyusunan APBDes didasarkan dengan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel.

Pemerintah Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, yang berfungsi mengayomi masyarakat desa, membuat peraturan desa, juga menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat desa, juga melaksanakan melaksanakan pembangunan melalui rencana keuangan tahunan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Partisipasi masyarakat yang merupakan modal dasar bagi pembangunan atas kemajuan desa, untuk itu peran masyarakat menjadi penting dalam membantu percepatan pembangunan melalui rencana keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahunan.

Kondisi partisipasi masyarakat Desa Mertani sendiri sangat bervariasi, baik dalam hal segi intensitasnya ataupun dari segi bentuknya. Jika dilihat dari segi intensitasnya, partisipasi masyarakat ada yang rendah partisipasinya, dan juga ada pula yang tinggi dalam partisipasi penyusunan APBDes. Dari segi bentuknya ada yang partisipasinya dalam bentuk non-fisik dengan menyalurkan pemikiran atau ide gagasan, ada pula partisipasinya dalam bentuk fisik, seperti ikut terlibat dalam hal pembangunan fisik Desa Mertani dalam peningkatan gorong-gorong,

peningkatan jalan lingkungan, peningkatan pasar (kios) desa, dan lain sebagainya.

Dari pemaparan uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul **“Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan APBDes di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”**

1. KAJIAN LITERATUR

A. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan APBDes

1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (2017) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat. Untuk lebih memahami rumusan partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program/kebijakan yang akan ditetapkan.

Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa, tercermin dari :

- Keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan pembangunan desa

- Mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat
- Memberikan data atau informasi dalam setiap pertemuan atau rapat pembangunan
- Keikutsertaan masyarakat dalam proses atau perumusan pembuatan keputusan

b) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat berwujud kontribusi tenaga dan uang.

Partisipasi jenis ini adalah lanjutan dari rencana yang sebelumnya telah disepakati, baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan ataupun tujuan.

c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih atau mendapat pengaruh positif bagi pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi ini tidak lepas dari kuantitas dan kualitas dari hasil pelaksanaan sebuah program yang sudah dicapai. Dari segi kuantitas, akan dilihat melalui presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, akankah berhasil sesuai target yang sudah ditetapkan atau tidak. Sedangkan dari segi kualitas dinilai berhasil jika suatu program akan ditandainya dengan peningkatan atau *output*.

d) Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai

pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang ditetapkan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD. Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

APBDes terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Belanja desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

B. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Dari hasil studi pustaka didapatkan bahwa pada umumnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Menurut Cohen, J. dan Uphoff (dalam jurnal Siti Robiah Nurbaiti dan Azis Nur Bambang, 2017) faktor internal yaitu mencakup karakteristik setiap individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk dapat berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu jenis

kelamin, jenis pekerjaan, status keluarga, agama, bahasa, umur, status dalam keluarga, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jarak rumah dengan lokasi pekerjaan dan juga lamanya tinggal dilingkungan tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dapat dikatakan berasal dari semua pihak luar yang berkepentingan dan memiliki pengaruh dari program tersebut. Suroso Hadi (dalam Yusuf Manggala, Moch Mustam, dan MS, 2017) melalui jurnalnya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Wisata Genting Kabupaen Semarang” memaparkan faktor eksternal adalah sebuah partisipasi yang terdiri dari komunikasi dan kepemimpinan.

C. Upaya Pemerintah Desa Menghadapi Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa menurut Kartasmita (dalam Ajeng Dini Utami, 2019) dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna meghadapi faktor penghambat partisipasi masyarakat.

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan kan berkembangnya potensi masyarakat (*enabling*). Pemberdayaan adalah upaya membangun kekuatan dari individu atau organisasi dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih

konkret, selain menciptakan iklim yang memungkinkan terjadinya pemberdayaan, juga menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

3. Makna melindungi yakni melindungi masyarakat yang lemah (kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif keempat adalah strategi penelitian induktif. Jenis penelitian ini membangun abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori dari pada menguji teori yang ada. Biasanya temuan kualitatif berupa tema, kategori, konsep atau hipotesis atau teori tentatif. Hasil penelitian kualitatif sangat deskriptif. (S. Aminah & Roikan, 2019:56)

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi atau tempat dimana obyek penelitian akan dilakukan. Dengan demikian, lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berada di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Desa Mertani ini, karena belum pernah diadakannya penelitian yang serupa serta Desa Mertani telah memasuki desa swakarya, dan menurut IDM ditahun 2022 Desa Mertani memasuki status Desa Maju.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi di lapangan nanti. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan

mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Adapun fokus-fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
 - a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 - b. Partisipasi dalam pelaksanaan
 - c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
 - d. Partisipasi dalam pengambilan evaluasi
2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
 - a. Faktor Internal
 - b. Faktor Eksternal
3. Upaya pemerintah desa menghadapi faktor penghambat partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Zuchri Abdussamad, 2021:142).

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data, pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk menggali suatu informasi yang

diperlukan dalam penelitian, bisa mengenai orang, kegiatan, kejadian yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai, melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan suatu makna dalam suatu topik tertentu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik penelitian yang menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen berkas dari kantor balai desa, baik dokumen tertulis ataupun elektronik. Dalam memperoleh data, teknik ini menggunakan non-interaksi, yang memang dilakukan peneliti agar nantinya data yang diperoleh semakin kuat. Data yang diambil berupa foto dokumentasi wawancara, foto pengelolaan APBDes, dan foto kondisi partisipasi masyarakat saat musyawarah desa yang terdapat di kantor Desa Mertani.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang mencari dengan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, dan mendalami literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas didalam pada judul skripsi ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (2019) dalam diterapkan melalui tiga alur yaitu:

1. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Agar peneliti memperoleh data yang diperlukan, peneliti harus mengumpulkannya secara sistematis dari sumber-sumber informasi yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder berdasarkan pada instrumen penelitian

2. *Reduction* /Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian bisa dikatakan adalah merangkum serta

memilih inti yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang yang tidak diperlukan. Mereduksi data nantinya akan mempermudah peneliti memperoleh gambaran yang jelas serta akan mempermudah dalam mengumpulkan data selanjutnya, dan juga akan memudahkan peneliti dalam mencarinya jika diperlukan..

3. *Display*/Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Verification*/Pengarikan

Simpulan Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan, dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali dari lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan APBDes di Desa Mertani Kecamatan Karanggeng Kabupaten Lamongan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan

Salah satu bentuk kontribusi masyarakat desa adalah dengan ikut serta dalam rapat musyawarah penyusunan APBDes melalui musyawarah desa, karena fokus utama musdes adalah pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, yang mana harus mampu bekerja dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya.

Masyarakat desa ikut menyumbangkan ide-ide, pikiran-pikiran, gagasannya untuk proses penyusunan

APBDes, pemerintah desa setempat memberikan kesempatan yang luang bagi masyarakat untuk ikut kegiatan partisipasi dalam proses perencanaan APBDes dalam menyusun program-program yang akan direncanakan. Karenanya pemerintah desa harus memandang masyarakat sebagai subjek pemerintah yang mampu menetapkan tujuan serta keinginan mereka, bukan hanya sebagai objek pemerintah.

Dengan memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta kemudian diungkapkan pada sebuah rapat pertemuan maka akan mencetuskan suatu ide atau gagasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan pada proses perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan pembangunan yaitu masyarakat Desa Mertani rata-rata telah berkontribusi dengan baik dan antusias dalam menyampaikan pendapatnya diforum musyawarah, meskipun ada sedikit masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti rapat atau musyawarah desa, karena mereka menganggap kehadiran masyarakat pada rapat musyawarah tidak memiliki manfaat yang besar yang menyangkut kepentingan mereka sendiri.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dapat berupa kontribusi. Kontribusi diartikan sebagai tindakan, keikutsertaan, keterlibatan atau sumbangsih untuk memberikan dampak positif maupun negatif kepada pihak lain.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya)

dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Dengan cara nyata, rutinitas gotong-royong sudah melembaga dan mengakar kuat. Khususnya di pedesaan, secara umum tetap meraih apresiasi positif dari masyarakat warga. Kegiatan gotong-royong dalam beragam dimensinya memberikan implikasi semangat dan value untuk saling memberikan jaminan atas hak dan kelangsungan hidup antar sesama masyarakat warga yang tetap melekat lumayan kuat di pedesaan. Sifat gotong royong di daerah pedesaan lebih menonjol dalam pola kehidupan mereka, seperti memperbaiki dan membersihkan jalan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan APBDes, masyarakat Desa Mertani berkontribusi dengan tenaga dan juga dengan uang.

Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat, penyusunan APBDes untuk masyarakat desa yaitu menggunakan program swakelola atau program padat karya tunai, yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan dan untuk mengurangi angka kemiskinan. Dengan skema padat karya tunai dalam pelaksanaan APBDes yang sudah ditentukan, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan

honorarium atau upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa Mertani.

Partisipasi Dalam Evaluasi

Sistem evaluasi menggunakan pelaporan APBDes diakhir tahun, yang disampaikan ke warga Desa Mertani, misal saja pembangunan tahun ini tidak dilaksanakan padahal sedari awal sudah dirapatkan dan disetujui, lalu dirapatkannya kembali. Karena evaluasi hasil pembangunan ini lebih kepada penilaian dalam mengawasi dan mengontrol setiap pembangunan yang sedang berjalan. Untuk pelaporan akhirnya sendiri langsung ke pusat, menggunakan sistem sistem keuangan desa atau siskeudes.

Lalu, Pemerintah Desa Mertani sendiri belum diadakannya musyawarah atau forum untuk evaluasi program dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang melibatkan masyarakat desa. Pada proses evaluasi selain membicarakan hasil-hasil dari pembangunan yang sudah dilaksanakan, masyarakat dapat memberikan penilaian berupa menyampaikan kritikan dan saran mengenai pembangunan desa yang sudah dilaksanakan kepada pemerintah, karena saat dalam proses evaluasi, pemerintah kurang memberikan perhatian kepada masyarakat.

2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Dalam partisipasi masyarakat tidak terlepas dari adanya suatu hambatan atau kendala yang terjadi pada proses pelaksanaannya. Pada umumnya faktor penghambat terjadi melalui dua sisi,

pertama yaitu faktor internal atau faktor yang terjadi dari dalam diri masyarakat, dan yang kedua yaitu faktor eksternal yang diakibatkan dari luar diri masyarakat.

Faktor Internal :

Umur

Faktor penghambat yang dialami terletak pada faktor usia, mereka yang sudah berumur memilih untuk tidak datang karena berfikir suara mereka sudah dapat diwakilkan dengan masyarakat desa yang lebih muda, sehingga pada proses perencanaan APBDes rapat kurang berjalan maksimal karena dengan tidak hadirnya dari semua kalangan umur.

Jenis Pekerjaan

Kondisi penghambat dari partisipasi masyarakat diakibatkan oleh jarak rumah dengan lokasi pekerjaan yang jauh, yang mana pada saat kesempatan untuk rapat mereka kurang aktif dalam memberikan tanggapan-tanggapan ataupun masukan-masukan untuk partisipasinya dalam penyusunan APBDes, sehingga mereka hanya ikut saja apa yang telah dipaparkan lalu diputuskan.

Pengetahuan

Pada partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan APBDes di Desa Mertani yang menjadi hambatan internal pada saat Musrenbangdes dilakukan yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan masyarakat yang masih rendah.

Masyarakat masih beranggapan bahwa keterlibatan atau partisipasi mereka pada kegiatan Musrenbangdes tidak mempengaruhi arah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan mereka juga beranggapan bahwa saat mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan Musrenbangdes tidak akan menjadi masalah terkait penyusunan APBDes yang ada di Desa Mertani.

Masyarakat yang masih saja selalu menggantungkan semua hal pada pemerintah, desa, mulai dari rencana hingga pada penetapan dipasrahkan kepada pemerintah desa, tanpa perlu ikut menyampaikan apa saja aspirasinya. Padahal suara dari masyarakat diperlukan untuk kemajuan Desa Mertani itu sendiri. Ini disebabkan oleh kondisi faktor pengetahuan dan juga pendidikan di Desa Mertani yang masih rendah. Sehingga secara otomatis juga mempengaruhi partisipasi masyarakat.

**Faktor Eksternal :
Keterlambatan Pagu**

Kendala yang dihadapi dari faktor eksternal ada ada pada pagu dana transfer yang mengalami keterlambatan pengiriman ke rekening desa.

Pagu dana desanya mengalami keterlambatan, jadi otomatis penyusunan APBDes terpaksa mundur, yang awalnya Desember mundur menjadi Januari. Padahal pemerintah Desa Mertani sudah melengkapi semua persyaratan, akan tetapi tetap saja mengalami keterlambatan pengiriman ke rekening Desa. Pagu dana transfer membiayai pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, penyelenggaraan program pemerintah, pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Kendalanya tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada ketua RT yang merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD itu sendiri. Masyarakat ingin meminta hal lain disampaikan ke dalam forum musyawarah desa, akan tetapi Ketua RTnya tidak pandai dalam hal menyampaikan aspirasi warganya. Ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang mana

mempunyai salah satu fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Maka jika dipikirkan kembali akan sangat bertentangan, jika lembaga kemasyarakatan desa yang termasuk RT tidak dapat menyampaikan dengan baik aspirasi masyarakatnya.

3. Upaya pemerintah desa menghadapi faktor penghambat partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Dalam mengatasi kendala-kendala pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes, pemerintah Desa Mertani juga melakukan Tindakan-tindakan yang sesuai agar dapat menyelesaikan kendala-kendala tersebut dengan menggunakan pendekatan yang baik.

Upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Mertani pada penyusunan APBDes yang pertama adalah dengan sosialisasi. Sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, ternyata mampu menggerakkan Partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Lalu dengan pendampingan, upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sarimulyo pada pembangunan yang kedua adalah dengan pendampingan. Langkah yang pertama dilakukan dalam pendampingan ini adalah dengan mengadakan dialog. kemudian pendampingan oleh pemerintah desa juga dilaksanakan dalam bentuk pengawasan. melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang proses pengambilan kebijakan dalam pembangunan, pengusulan rencana pembangunan melalui musyawarah desa

Melakukan koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan. Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan. Kepala Desa Mertani dalam melaksanakan tugas koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan mengadakan rapat desa yang bertempat di kantor desa dengan mengundang perwakilan desa seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, LKMD, BPD dan perangkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan tentang partisipasi masyarakat dalam desa dalam penyusunan APBDes di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan APBDes
 - a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan
Partisipasi pengambilan keputusan adalah dengan keikutsertaan masyarakat dalam keputusan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Mertani baik, akan tetapi masih minim untuk beberapa RT dalam proses musrembang sehingga masyarakat belum mampu menyampaikan aspirasinya dengan baik.
 - b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat Desa Mertani dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut berkontribusi dengan tenaga dan uang. Dalam pelaksanaannya masyarakat Desa Mertani masih aktif dengan meluangkan waktunya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam hal gotong-royong.

c. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan manfaat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dilakukan pemerintah desa adalah menggunakan sistem swakelola yang mana para pekerja untuk membangun desa menggunakan tenaga sendiri dari masyarakat Desa Mertani.

d. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat desa dalam evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa sangat minim karena tidak dilibatkannya masyarakat Desa Mertani dalam tahap evaluasi APBDes.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

a. Faktor Internal

Pada faktor internal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa datang dari dalam diri masyarakat, yaitu ada pada umur, jenis pekerjaan, dan masyarakat yang masih menganggap semua hal diatur penuh oleh pemerintah desa.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Mertani yang berasal dari semua pihak luar diri masyarakat, yaitu masih adanya keterlambatan pagu dana desa yang mengakibatkan adanya keterlambatan penyusunan APBDes dan juga dari

lembaga kemasyarakatan desa atau RT yang kurang bisa menyampaikan ketika diadakannya musrembang.

3. Upaya Pemerintah Desa Menghadapi Faktor Penghambat

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menghadapi faktor penghambat, guna meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Mertani adalah dengan diadakannya sosialisasi dengan turba atau turun ke bawah yang dilakukan BPD untuk bertemu langsung dengan masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat yang berkoordinasi dengan lembaga desa.

SARAN

Setelah melakukan penelitian maka penulis memberikan saran yang semestinya akan dapat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan :

1. Perlu adanya partisipasi dari pemerintah desa kepada masyarakat untuk mengajak serta mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
2. Perlu dilakukannya penguatan kelembagaan desa RT, yang mana dengan meningkatkan kemampuan komunikasi kerja dar RT melalui bimbingan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja dari RT karena lembaga kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa.
3. Perlu ditingkatkan sosialisasi BPD yang awalnya satu kali menjadi lebih dari satu atau beberapa kali.

REFERENSI

Buku

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Teknik Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Ahmad, Jamaluddin. 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media.

Bihanding, Hariawan. 2019. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Deepublish.

Damsar. 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mahardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mulyadi, Mohammad. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.

Mu'iz, Muhammad. 2021. *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bandung: Bumi Aksara.

Roikan, S. Aminah. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tawai, Andrian dan Muh. Yusuf. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Kendari: Literacy Institute.

Utami, Ajeng Dini. 2019. *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.

Jurnal

Manggala, Yusuf, Moch Mustam, dan MS. (2017). "Analisis Faktor-Faktor Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Wisata Genting Kabupaten Semarang". *Jurnal Administrasi Publik*.

Nurbaiti, Siti Robiah dan Azis Nur Bambang. (2017). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)". *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 224-228

Pratama, Renaldo Putra. dkk. 2016, "Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri)". *Jurnal Administrasi Bisnis*, vol. 30, no. 1 2.

Ardila, Tiffani. dkk. "Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, Hal. 71-77.

Website

<http://pidodokulon.desa.id/kabardetail/4279/tahapan-penyusunan-apbdes.html> (diakses 20 Mei 2021)

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007

Undang-undang dasar 1945 Pasal 1 ayat (2)